

DISCREPANCY EVALUATION MODEL (DEM) UNTUK MENGEVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF

Alpha Ariani

Program Studi Administrasi Pendidikan, FKIP, Universitas Achmad Yani Banjarmasin

e-mail: alphaariani@uay.ac.id

Abstract: Programs prepared in order to advance education continue to progress and develop dynamically, one of which is an inclusive education implementation program. An evaluation process is required to improve and refine the program. One model that can be applied is the Discrepancy Evaluation Model (DEM) model developed by Provus. The research aimed to conduct a theoretical study on the use of DEM models to evaluate inclusive education programs. The approach used is the study of libraries with data obtained through the study of relevant documents, books, and articles then analyzed with interactive models from Miles and Huberman: (1) data collection, (2) data reduction, (3) presentation of data, and (4) conclusions. The procedures used in this gap evaluation model go through four stages: (1) design, (2) installation, (3) process, (4) product. The result of the application of this model is that at each stage of evaluation can be known the gap that occurs between the expected conditions and the reality in the field, so that it can be a guide to make decisions in the framework of improvement and development of the program.

Keywords: *DEM; Program Evaluation; Inclusive Education.*

Abstrak: Program yang disusun dalam rangka memajukan pendidikan terus mengalami kemajuan dan berkembang secara dinamis, salah satunya adalah program penyelenggaraan pendidikan inklusif. Diperlukan proses evaluasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan program ini. Salah satu model yang dapat diterapkan adalah model evaluasi kesenjangan (*Discrepancy Evaluation Model/DEM*) yang dikembangkan oleh Provus. Tujuan penelitian ini adalah melakukan telaah teoritis tentang penggunaan model DEM untuk mengevaluasi program penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka dengan data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku, dan artikel yang relevan kemudian dianalisis dengan model interaktif dari Miles and Huberman yaitu: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan. Prosedur yang digunakan dalam model evaluasi kesenjangan ini melalui empat tahapan yaitu: (1) desain, (2) instalasi, (3) proses, (4) produk. Hasil dari penerapan model ini adalah pada setiap tahapan evaluasi dapat diketahui kesenjangan yang terjadi antara kondisi yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan, sehingga dapat menjadi petunjuk untuk mengambil keputusan dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan program.

Kata kunci: *DEM; Evaluasi Program; Pendidikan Inklusif.*

PENDAHULUAN

Evaluasi perlu dilakukan untuk menentukan apakah suatu program telah berjalan secara efektif atau tidak. Melalui evaluasi program, dapat diketahui apakah program tersebut layak untuk dilanjutkan, perlu diperbaiki, atau bahkan perlu dihapuskan. Hasil tersebut kemudian direkomendasikan kepada pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk hasil evaluasi tersebut. Menurut Arikunto dan Jabar, evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya. Lebih lanjut dijelaskan

kan bahwa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pengambil keputusan belum tentu dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan jiwa kebijakan (Arikunto, S. dan Jabar, 2014). “A program evaluation theory is a coherent set of conceptual, hypothetical, pragmatic, and ethical principles forming a general framework to guide the study and practice of program evaluation” (Stufflebeam, D.L. dan Shinkfield, 2007). Evaluasi program dilihat dari konteks dilaksanakan untuk mengidentifikasi kondisi, berbagai isu, dan kendala yang ada dalam lingkungan program (Mustrofin, 2010). Dengan demikian, evaluasi program adalah seperangkat kegiatan yang bertujuan untuk

menilai tingkat keterlaksanaan dan keberhasilan suatu program. Melalui evaluasi program diharapkan mendapat informasi untuk pengembangan program tersebut di masa yang akan datang.

Discrepancy Evaluation Model (model evaluasi kesenjangan); yang dikembangkan oleh Malcolm M. Provus pada tahun 1971; merupakan salah satu model yang dapat dipergunakan untuk mengevaluasi suatu program. Model evaluasi ini menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program, dimana evaluator mengukur adanya perbedaan antara yang seharusnya dicapai dengan yang sudah riil dicapai di setiap komponen program (Arikunto, S. dan Jabar, 2014). Model ini dapat digunakan untuk mengevaluasi program-program yang ada diberbagai bidang, antara lain: di bidang sumber daya manusia seperti mengevaluasi penempatan tenaga kesehatan di puskesmas (Said, Madhakomala, dan Idris, 2019). Di bidang teknologi informatika seperti mengevaluasi usability web pemerintah (Lestari, Herlambang, dan Saputra, 2018). Selain itu untuk mengevaluasi program bimbingan dan konseling (Saputra, 2019), dan juga bidang pendidikan seperti mengevaluasi program parenting kelas, implementasi standar penilaian, implementasi pendekatan pembelajaran (Ekawati dan Iriani, 2021; Fitria dan Triana, 2017; Andriyani, Marhaeni, dan Mertasari, 2017).

Satu diantara banyak program di bidang pendidikan yaitu program penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif diartikan sebagai usaha menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan maupun yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dengan cara-cara yang realistis dan komprehensif dalam kehidupan pendidikan yang menyeluruh bersama-sama dengan siswa pada umumnya (Smith, 2015;

Permendiknas No. 70 Tahun 2009). Pemilihan model evaluasi yang tepat untuk digunakan dalam konteks penyelenggaraan pendidikan inklusif tidaklah mudah. Hal ini karena pendidikan inklusif merupakan model pendidikan yang masih relatif baru. Banyak peneliti menggunakan model CIPP yang menekankan pada bagaimana *konteks* (konteks), *input* (masukan), *process* (proses) dan *product* (hasil) dari program penyelenggaraan pendidikan inklusif yang telah dijalankan. Pada komponen konteks diketahui apa yang menjadi tujuan dan alasan suatu sekolah menyelenggarakan program ini; komponen masukan (*input*) mengevaluasi tentang siswa yang memiliki kebutuhan khusus (ABK), sarana prasarana, guru pembimbing khusus (GPK), guru kelas, dan pembiayaan; pada komponen proses yaitu bagaimana monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan penilaian untuk siswa ABK; dan pada komponen hasil (*product*) mengevaluasi tentang perkembangan akademik dan non akademik siswa ABK (Sartica & Ismanto, 2016; Widyawati, 2017; Suryati & Haryanto, 2016; Yuwono, 2017).

Telaah lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif sehingga diketahui kesenjangan yang terjadi antara apa yang diharapkan program tersebut dengan kenyataan di lapangan, dapat menggunakan model evaluasi kesenjangan (DEM). Sebab dalam suatu program apapun khususnya dalam pendidikan maupun pembelajaran secara tidak langsung perlu diketahui tingkat kesenjangannya, yaitu perbedaan antara standar dengan kenyataan.

Sebelum melakukan kegiatan praktis diperlukan penguasaan tentang evaluasi program. Penguasaan evaluasi program bisa dilakukan melalui mempelajari teori secara luas dan mendalam, kemudian dilanjutkan melalui kegiatan praktis yang terencana sehing-

ga evaluasi program dikuasai secara sinergis (Sukardi, 2014). Manfaat dari penguasaan teoritis dan praktis dalam evaluasi program berfungsi agar program yang dilaksanakan dapat menjadi lebih baik serta lebih berstandar sesuai yang diharapkan. Terkait dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah melakukan telaah teoritis tentang penggunaan model evaluasi DEM untuk mengevaluasi program penyelenggaraan pendidikan inklusif sehingga akan menghasilkan rekomendasi demi pengembangan program di masa yang akan datang.

METODA

Pendekatan studi pustaka digunakan dalam pengumpulan informasi. Prosedur dalam penelitian studi pustaka ini terdiri dari: (1) pengumpulan data dengan cara melakukan tinjauan dokumen dari kumpulan buku dan artikel yang relevan tentang evaluasi model *discrepancy* dalam pendidikan, (2) penyajian temuan teori-teori yang relevan, (3) melakukan analisis, serta (4) menarik kesimpulan.

Rancangan DEM pada artikel ini dimaksudkan untuk mengevaluasi program penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota Banjarmasin. Sumber data primer yang digunakan adalah buku *Discrepancy Evaluation: For Educational Program Improvement and Assessment* dari Malcolm M. Provus (1971) dan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang membahas tentang evaluasi program, buku-buku tentang pelaksanaan pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus, permendiknas RI No. 70 Tahun 2009, dan referensi dari artikel jurnal dengan pokok bahasan terkait.

Metoda analisis yang dipakai ada-

lah model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014), yaitu dengan cara: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan.

HASIL

1. Evaluasi Program

Evaluasi merupakan penilaian terhadap sebuah data yang dikumpulkan melalui asesmen. Definisi evaluasi dikemukakan oleh banyak ahli, antara lain menurut Stufflebeam & Shinkfield (2007), “*evaluation is a process for giving attestations on such matters as reliability, effectiveness, cost-effectiveness, efficiency, safety, ease of use, and probity.*” Pendapat Arikunto dan Jabar (2014) tentang evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Lebih spesifik Sukardi (2015) berpendapat bahwa evaluasi adalah proses memahami, memberi arti, mendapatkan dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan pengambilan keputusan. Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan para ahli tersebut di atas maka dapat disintesis bahwa evaluasi adalah suatu proses mengumpulkan informasi tentang kondisi nyata sesuatu hal, memberi arti, membandingkan dengan kriteria tertentu, dan kemudian mengkomunikasikan untuk dipergunakan dalam membuat keputusan tentang suatu kegiatan.

Program merupakan istilah yang banyak muncul dalam kaitan kebijakan pemerintah. Program merupakan operasionalisasi dari kebijakan untuk diimplementasikan dalam tindakan nyata.

Secara konsep, program banyak didefinisikan oleh para ahli, antara lain “*a program is an organized collection of activities designed to reach certain objectives*” (Thyer, B.A. and Padgett, 2010). Program berarti kumpulan aktivitas terorganisasi yang didesain untuk mencapai sasaran tertentu. Program juga didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang (Arikunto, S. dan Jabar, 2014).

Untuk mengetahui seberapa jauh dan bagian mana dari tujuan yang sudah tercapai, dan bagian mana yang belum tercapai serta apa penyebabnya, perlu adanya evaluasi program. Tanpa ada evaluasi, keberhasilan dan kegagalan program tidak dapat diketahui. Beberapa ahli memberikan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan evaluasi program. Menurut Stufflebeam dan Shinkfield, “*a program evaluation theory is a coherent set of conceptual, hypothetical, pragmatic, and ethical principles forming a general framework to guide the study and practice of program evaluation*” (Stufflebeam, D.L. and Shinkfield, 2007). Sedangkan menurut pendapat Murofin (2010), evaluasi program dilihat dari konteks dilaksanakan untuk mengidentifikasi kondisi, berbagai isu, dan kendala yang ada dalam lingkungan program. Ahli lain mengatakan bahwa evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya (Arikunto, S. dan Jabar, 2014). Lebih lanjut dijelaskan bahwa ke-

bijakan yang sudah dikeluarkan oleh pengambil keputusan belum tentu dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan jiwa kebijakan. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disintesis bahwa evaluasi program adalah seperangkat kegiatan yang bertujuan untuk menilai tingkat keterlaksanaan dan keberhasilan suatu program. Melalui evaluasi program diharapkan mendapat informasi untuk pengembangan program tersebut di masa yang akan datang.

2. Discrepancy Evaluation Model (DEM)

Discrepancy Evaluation Model (model evaluasi kesenjangan) yang sering disingkat DEM dikembangkan Malcolm M. Provus. Model evaluasi ini menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program, dimana evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen.

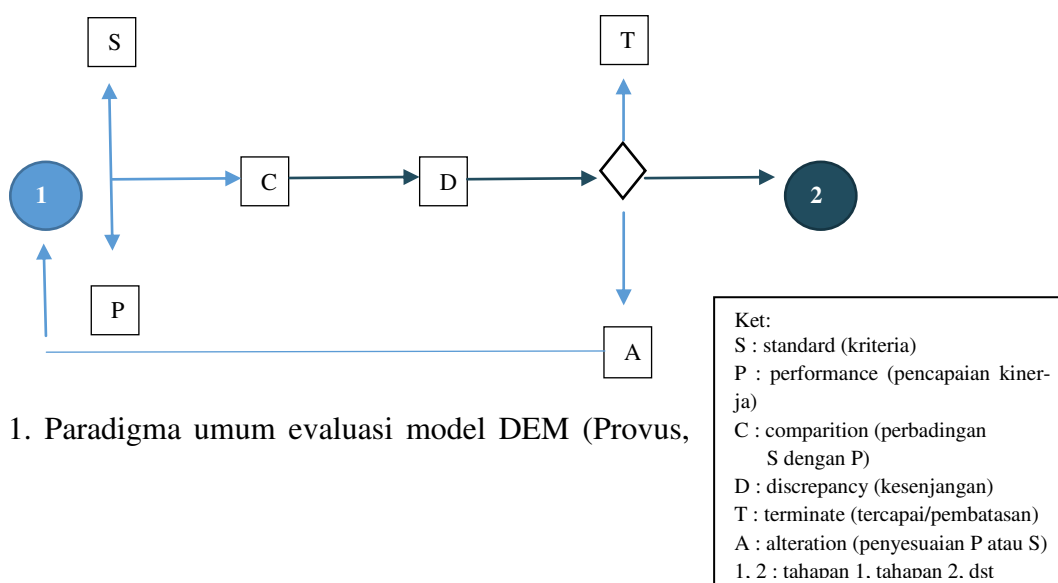
Provus (1971) menjelaskan bahwa evaluasi program adalah proses: (1) mendefinisikan standar-standar program; (2) menetapkan kesenjangan antara kenyataan dengan aspek dari program; dan (3) menggunakan informasi kesenjangan tersebut untuk merubah kinerja (*performance*) atau merubah standar dari program tersebut. Ada tiga konsep kunci yang perlu diperhatikan untuk memahami DEM yaitu konsep *Standard* (S) atau standar, *Performance* (P) atau kinerja, dan *Discrepancy* (D) atau kesenjangan.

Evaluasi dalam DEM diartikan sebagai perbandingan antara apa yang ada sebagai pencapaian/kinerja (*performance*) dengan apa yang seharusnya (*standard*). Jika sebuah perbedaan ditemukan yang menunjukkan antara

standar dan kinerja berbeda, disebut kesenjangan (*discrepancy*). Jadi evaluasi merupakan perbandingan kinerja yang sesungguhnya (*performance*) dengan kinerja yang diharapkan oleh standar. Suatu standar mengandung pengertian antara lain sebagai suatu daftar, uraian, penyajian berkaitan kualitas atau karakteristik yang perlu dimiliki obyek. Sedangkan kinerja pada model ini diartikan sebagai keadaan atau kualitas sebenarnya dari objek tersebut. Saat evaluator mencari tahu karakteristik aktual objek yang ingin dievaluasi, maka ia sedang melakukan pengukuran kinerja, dan karena itu, evaluasi adalah membandingkan standar dengan kinerja. Perbandingan

tersebut akan menghasilkan informasi tentang ada atau tidak adanya kesenjangan.

Model ini diterapkan melalui lima tahapan evaluasi yaitu tahap (1) *Design*, (2) *Installation*, (3) *Process*, (4) *Product*, dan (5) *Cost*. Di setiap tahapan adalah membandingkan antara kenyataan dengan standar, dan bila menunjukkan adanya perbedaan maka disebut dengan 'kesenjangan' (*discrepancy*). Informasi kesenjangan yang didapatkan dari setiap tahapan nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengadaptasi/menyesuaikan program yang ada. Proses pada setiap tahapan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Paradigma umum evaluasi model DEM (Provus, 1971)

1) Tahap *Design*, yaitu mendeskripsikan desain program berdasar informasi tentang realitas program (*performance*). Selanjutnya desain program ini dibandingkan dengan kriteria desain yang disebut dengan standar. Desain program tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai pembanding (kriteria) pada tahap instalasi, proses, dan produk.

2) Tahap *Installation*, yaitu penerapan/instal sumber daya yang mendukung

pelaksanaan program. Untuk selanjutnya sumber daya program yang telah diinstal tersebut dibandingkan dengan desain program (*standard*) yang telah dibuat di tahap 1 sehingga dapat diidentifikasi kesenjangan-kesenjangan yang ada. Tujuan dari tahap dua ini adalah untuk mengetahui sejauh mana program telah diterapkan.

3) Tahap *Process*, difokuskan pada hubungan antara pelaksanaan (*process*)

dan capaian sementara (*interim product*) dari program yang sedang dilaksanakan, serta membandingkannya dengan desain program (*standard*) untuk menentukan sampai seberapa tinggi pencapaian keluaran jangka pendek (*interim product*).

4) Tahap *Product*, yaitu derajat kesesuaian antara hasil/tujuan akhir (*terminal product*) yang benar-benar telah dicapai (*reality*) dengan desain program (*standard*).

5) Tahap *Cost*, yaitu menganalisis biaya yang telah digunakan untuk pelaksanaan program dengan keuntungan yang didapatkan (*cost-benefit analysis*). Hasil analisis inilah yang akan menentukan apakah program tersebut akan diteruskan atau diberhentikan; berkaitan dengan efisiensi program (Provus, 1971).

Tahap 1 sampai 4 merupakan tahapan yang harus dilakukan, sedangkan tahap 5 merupakan tahapan pilihan yang memfasilitasi untuk membandingkan dengan dua atau lebih program lain. Oleh karena merupakan tahapan pilihan maka dapat dilakukan atau pun tidak.

3. Program Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif sering diartikan sebagai upaya memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk bersekolah di kelas reguler bersama dengan anak normal. Padahal sebenarnya pendidikan inklusif tidak hanya sekedar menggabungkan ABK dengan anak normal di kelas reguler tetapi memberikan layanan pendidikan dengan tidak melakukan diskriminasi sehingga tercipta kelas keberagaman (Hasyim, 2013). ABK adalah anak-anak yang memiliki keterbatasan kemampuan mental atau fisik sehingga memiliki

kebutuhan khusus, seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, tunaganda, autisme. Selain itu juga anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, lamban belajar, anak jalanan, anak korban narkoba, anak dalam suku dan adat budaya tertentu, anak PSK (baca: anak dari pekerja seks komersial) dan PSK anak (baca: pekerja seks komersial anak), anak daerah terpencil, anak perbatasan, serta anak berkecerdasan dan berbakat istimewa (Rachmayana, 2013).

Melalui pendidikan inklusif diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang secara optimal. Secara lebih spesifik, Eggen dan Kauchak (2004) dalam Surna dan Pabdeirot (2014) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang komprehensif yang dilaksanakan secara sistematis, total, dan terkoordinasi.

Pendidikan inklusif menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Melalui sistem pendidikan ini ABK memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pendidikan. Melalui pendidikan inklusif juga antara anak-anak yang memiliki hambatan dan anak-anak normal dapat disatukan secara komprehensif sehingga terjalin rasa saling menghormati. Pendidikan inklusif mencerminkan tentang keberagaman yang meliputi: agama, ekonomi, budaya, gender, bahasa, dan anak berkebutuhan. Inklusif adalah mendidik anak-anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus secara penuh waktu dalam kelas reguler (Santrock, 2012) sehingga ABK mendapatkan pela-

yanan pendidikan yang efektif di kelas reguler bersama anak-anak normal.

Fungsi pendidikan inklusif adalah untuk menjamin semua ABK mendapatkan kesempatan dan akses yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya dan bermutu di berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk mengembangkan potensinya secara optimal (Kustawan, 2013). Melalui pendidikan inklusif, ABK akan dapat meningkatkan rasa percaya diri, memiliki kesempatan menyesuaikan diri, dan memiliki kesiapan dalam menghadapi kehidupan di masyarakat, sedangkan anak normal dapat belajar mengenai keterbatasan, kelebihan, dan keunikan tertentu pada temannya sehingga dapat mengembangkan keterampilan sosial, menumbuhkan rasa empati dan simpati terhadap orang lain (Kustawan, 2013). Oleh karenanya penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik (Departemen Pendidikan Nasional, 2007).

Merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif provinsi Kalimantan Selatan ada tujuh komponen pendidikan yang harus dilakukan penyesuaian, yaitu peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, kegiatan pembelajaran, cara memberikan penilaian atau evaluasi hasil belajar, sarana prasarana, dan pembiayaan. Komponen tersebut dirancang dalam program pendidikan inklusif tingkat kabupaten/kota yang merujuk pada pedoman penyelenggaraan

pendidikan inklusif provinsi Kalimantan Selatan dan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

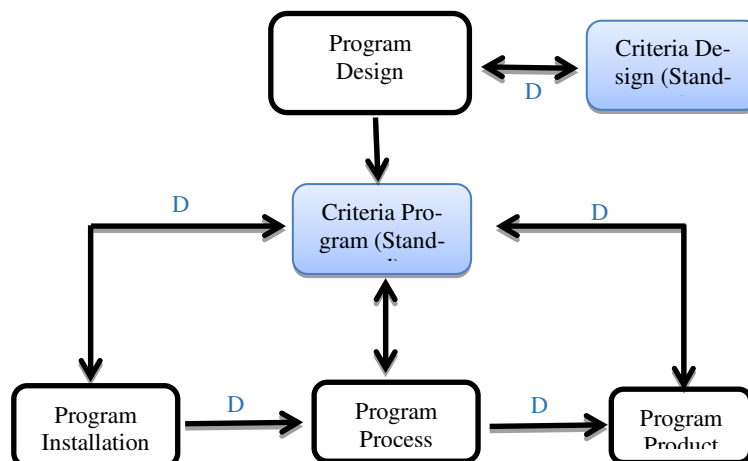
PEMBAHASAN

Penggunaan DEM untuk mengevaluasi program pendidikan inklusif dinilai memadai karena: pertama, akan dapat diketahui kesenjangan antara standar kinerja yang telah ditetapkan dengan kinerja aktual yang telah dilaksanakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif; kedua, melalui model evaluasi kesenjangan didapatkan informasi yang lebih rinci tentang pelaksanaan program sehingga dapat diketahui pada tahapan mana program tidak berjalan dengan baik sehingga dapat diperbaiki; ketiga, merupakan evaluasi formatif sehingga dapat merevisi dan mengoreksi program untuk mengarahkan pada tujuan awal; keempat, lebih mudah dipahami karena hanya membandingkan kinerja program dengan standar kinerja yang telah diformulasikan. Identifikasi kesenjangan dapat menjadi masukan untuk pengembangan program yang sedang berjalan maupun yang telah selesai.

Telah diuraikan di atas bahwa model evaluasi kesenjangan (DEM) menerapkan lima tahapan yaitu tahap desain, instalasi, proses, produk, dan *cost*. Keuntungan (*benefit*) yang diperoleh melalui kegiatan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini lebih pada keuntungan non material; yaitu banyaknya anak ABK yang memiliki kesempatan untuk mendapat pendidikan dan terlayani di sekolah reguler (sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya), orangtua terbantu karena anaknya yang ABK dapat dimaksimalkan potensinya dan tidak harus mengeluarkan biaya yang tinggi, serta tercapainya program

pemerintah untuk pemerataan pendidikan bagi seluruh warga Negara. Program lain yang sejenis juga tidak ada sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dalam hal

biaya atau benefit antara program ini dengan program lain yang sejenis. Oleh karenanya tahap lima yaitu *cost*, bisa saja tidak dilakukan (diabaikan).



Gambar 2. Proses Evaluasi Model DEM

Adaptasi penerapan DEM untuk mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota Banjarmasin dijabarkan sebagai berikut:

Evaluasi Tahap Design

Pada tahap ini, desain program penyelenggaraan pendidikan inklusif akan dievaluasi apakah sesuai dengan standar. Sebelum melakukan evaluasi, penting untuk menyusun suatu standar yang diperoleh berdasarkan kriteria struktural dan teoritis, pendapat ahli, atau konsultan (Provus, 1971). Evaluasi difokuskan pada sifat dasar program; *objectives, students, staff and other resources required for the program, and actual activities designed to promote attainment of the objectives* (Nyre & Rose, 1979). Dengan demikian akan dapat diketahui apakah desain program telah dirumuskan secara jelas dan memadai.

Program Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kota Banjarmasin merupakan suatu desain program. Desain kegiatan dari program ini dapat dikelompokkan dalam beberapa aktivitas sebagai berikut :

1) Sosialisasi ke sekolah-sekolah dan

masyarakat tentang pentingnya sekolah inklusif untuk perkembangan ABK.

2) Menyiapkan sekolah inklusif, yang meliputi persiapan siswa ABK, persiapan guru damping (GPK), persiapan sarana prasarana, dan biaya.

3) Menyiapkan perangkat pelayanan pembelajaran untuk ABK, yang meliputi persiapan kurikulum, persiapan proses pembelajaran, dan persiapan penilaian/evaluasi hasil belajar.

Program ini memuat hal-hal seperti: latar belakang program, dasar hukum, tujuan program, sosialisasi sekolah inklusif, peserta didik, guru, kurikulum, aktivitas pembelajaran, penilaian/evaluasi hasil belajar, sarana prasarana, pembiayaan, dan produk. Kegiatan evaluasi pada tahap ini yaitu membandingkan aspek-aspek tersebut dengan standar, yang mana kriterianya ditetapkan berdasarkan teori, Permendiknas No. 70 Tahun 2009, dan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif Provinsi Kalimantan Selatan. Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan (*discrepancy*) maka menjadi

masukannya untuk penyempurnaan/pengembangan program ini. Selanjutnya, program penyelenggaraan pendidikan inklusif ini akan bertindak sebagai standar yang digunakan untuk menilai implementasi program.

Evaluasi Tahap *Installation*

Evaluasi pada tahap ini membandingkan antara realitas dari program (kinerja); yaitu derajat tingkat instalasi (implementasi) sumber daya yang mendukung; dengan kriteria yang tercantum pada program penyelenggaraan pendidikan inklusif (*standard*). Pertanyaan yang diajukan adalah apakah program dilaksanakan sebagaimana rumusan dalam desain program penyelenggaraan pendidikan inklusif. Jadi evaluasi dilakukan pada masukan (*input*) komponen-komponen program dan rencana aktivitas program yang meliputi: sosialisasi sekolah inklusif, ijin operasional penyelenggara pendidikan inklusif yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, realisasi kriteria calon peserta didik dan jumlah ABK di setiap kelas, realisasi kurikulum yang digunakan untuk ABK, persyaratan SDM (guru) dan komposisi jumlah ABK yang didampingi. Aspek lain yaitu sarana prasarana umum dan aksesibilitas sarana prasarana yang ada di sekolah, serta sumber dana untuk pembiayaan pelaksanaan pendidikan inklusif.

Evaluasi dilakukan untuk menentukan tingkat ketercapaian realisasi input tiap komponen program dan realisasi rencana aktivitas (*process*) program penyelenggaraan pendidikan inklusif. Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan (*discrepancy*) maka sekolah penyelenggara perlu berbenah, melengkapi dan menyesuaikan diri agar penerapannya sesuai dengan program yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengarah pada pemberian pelayanan yang

optimal pada ABK.

Evaluasi Tahap *Process*

Pada tahap ini tujuan evaluasi adalah menilai hubungan antara pelaksanaan/aktivitas program (*process*) dengan capaian sementara (*interim product*). Pertanyaan yang diajukan adalah apakah sumber daya dan teknik yang sedang digunakan sesuai dengan tujuan program. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dinas pendidikan kota Banjarmasin dan sekolah inklusif dengan kriteria program (*standard*).

Evaluasi di tahap ini yaitu menilai pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah yang meliputi: penerimaan terhadap keberadaan siswa ABK di sekolah dan pelibatannya dalam kegiatan-kegiatan sekolah, sistem koordinasi guru khusus baik dengan guru kelas maupun dengan orangtua siswa ABK, persiapan pengelolaan pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran, metoda belajar yang diterapkan, proses penilaian hasil belajar siswa, serta ketercapaian *interim product*. Fokus evaluasi adalah menilai apakah pelaksanaan aspek-aspek tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Jika ternyata tidak, maka perlu dilakukan perubahan terhadap aktivitas-aktivitas yang diarahkan untuk mencapai tujuan perubahan tersebut.

Evaluasi Tahap *Product*

Di tahap ini, mengevaluasi apakah realitas hasil akhir atau sasaran utama (*terminal product*) program telah dicapai sesuai dengan desain program (*standard*). Pertanyaan yang diajukan adalah apakah sasaran hasil program tercapai di dalam implementasinya. Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah: 1) memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan 2) tercipta sistem pendidikan yang menghargai keberagaman, tidak diskriminatif dan pembelajaran yang ramah terhadap semua peserta didik. Fokus evaluasi adalah menilai apakah tujuan program tersebut telah tercapai atau tidak. Jika tidak, maka menjadi masukan untuk revisi program. Sebaliknya jika tercapai maka program dapat dikembangkan menjadi lebih sempurna.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penerapan DEM untuk mengevaluasi program penyelenggaraan pendidikan inklusif dilakukan dalam empat tahapan yaitu tahap desain program, instalasi, proses, dan produk dari program yang sedang atau sudah dijalankan. Setiap tahapan evaluasi selalu membandingkan antara standar dengan kinerja (realitas) di lapangan. Perbedaan yang terjadi antara standar dan realitas atau kinerja disebut dengan kesenjangan (*discrepancy*). Di setiap tahapan evaluasi akan dapat diketahui ada tidaknya kesenjangan pada setiap komponen program. Informasi tentang ada tidaknya kesenjangan tersebut dapat menjadi masukan bagi pemegang kebijakan untuk merevisi, mengembangkan atau menghapus program.

Sebelum mengevaluasi suatu program perlu untuk menyusun kriteria yang merujuk pada teori, pendapat ahli, atau konsultan sehingga diperoleh informasi ideal terkait program tersebut. Kriteria ini akan menjadi standar untuk mengevaluasi desain program. Aktivitas evaluasi di tahap desain yaitu membandingkan antara program penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan kriteria yang telah disusun dan dijadikan standar. Hasil evaluasi di tahap ini menjadi masukan untuk perbaikan/penyempurnaan

program. Untuk selanjutnya, kinerja di setiap tahapan program akan dibandingkan dengan desain program. Desain program menjadi standar untuk mengevaluasi komponen di setiap tahapan evaluasi.

Pada tahap instalasi, yaitu membandingkan antara implementasi sumber daya pendukung dengan kriteria (standar) yang tercantum pada program. Di tahap proses, membandingkan antara realisasi kegiatan atau aktivitas dengan kriteria yang tercantum pada program. Demikian juga di tahap produk yaitu membandingkan antara hasil yang dicapai dengan tujuan dilaksanakannya program tersebut.

Saran

Telaah teoritis tentang model evaluasi lain untuk mengevaluasi program penyelenggaraan pendidikan inklusif perlu dilakukan. Hal ini akan mengembangkan wawasan dan pemahaman konsep evaluator tentang berbagai model evaluasi sehingga mampu memilih model yang tepat sesuai karakteristik program dan dapat mengimplementasikan secara tepat dalam kegiatan praktis.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriyani, P.E.A., Marhaeni, A.A.I.N., & Mertasari, N.M.S. (2017). Analisis Diskrepansi Tentang Implementasi Pendekatan Saintifik Pada Kelas IV SD Negeri di Kecamatan Denpasar Barat. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Indonesia* Vol. 7 No. 2, Agustus 2017.
- Arikunto, S. dan Jabar, C.S. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Dirjen PKK-LK.

- Ekawati, E.Y., Iriani, A. (2021). Evaluasi Discrepancy Program Parenting Class dalam Rangka Meningkatkan Hubungan Masyarakat. *Jurnal Obse-si: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Vol. 5, Issue 1.
- Fitria, F.W., Triana, D.D. (2017). Evaluasi Implementasi Standar Penilaian Pada Sekolah Alam Bogor Berdasarkan Model Evaluasi Provus. *Jurnal Eval-uasi Pendidikan* Vol. 8, No. 1, Maret 2017.
- Hasyim, Y. (2013). Pendidikan Inklusif di SMK Negeri 2 Malang. *Jurnal Ke-bijakan Dan Pengembangan Pen-didikan*, 1(2).
- Kustawan, D. and Meimulyani, Y. (2013). *Mengenal Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Serta Implementasinya*. Jakarta: Luxima Metro Media.
- Lestari, N.D.I., Herlambang, A.D., Saputra, M.C. (2018). Evaluasi Usabilitas Situs Web Pemerintah Kabupaten Mo-jokerto Dengan Menggunakan Discrepancy Evaluation Model (DEM). *Jurnal Pengembangan Teknologi In-formasi dan Ilmu Komputer* Vol. 2, No. 10, Oktober 2018.
- Mustrofin. (2010). *Evaluasi Program*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Nyre Glenn F. and Rose Clare. (1979). *Evaluation The Practice of Evaluation*. POD Quarterly, 1(3).
- Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Kalimantan Selatan. (2013).
- Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Kalimantan Selatan. (2013).
- Permendiknas RI No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. (n.d.)
- Provus Malcolm. (1971). *Discrepancy Eval-uation: For Educational Program Improvement and Assessment*. California: McCutchan Publishing Corporation.
- Rachmayana, D. (2013). *Diantara Pendidikan Luar Biasa Menuju Anak Masa Depan yang Inklusif*. Jakarta: PT. Luxima Metro Media.
- Said, Meldasari., Madhakomala, R., Idris, Fahmi. (2019). Discrepancy Evaluation Model For Human Resources Health Placement Evaluation At The Puskesmas. *Journal of Environmental Treatment Techniques* Vol. 7, Issue 4.
- Santrock John W. (2012). *Psikologi Pendidikan Buku 1 Terjemahan Diana Angelica*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Saputra, W.N.E. (2019). Evaluasi Model Discrepancy: Salah Satu Model Evaluasi Program Konseling. *Insight: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 8(1) Juni 2019.
- Sartica, D. dan Ismanto, B. (2016). Evaluasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Kelola*, 3(1).
- Smith, J. David. (2015). *Sekolah untuk Semua: Teori dan Implementasi Inklusi*. Editor ahli Mohammad Sugiarmen & MIF Baihaqi. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Stufflebeam Daniel L. and Shinkfield Anthony J. (2007). *Evaluation Theory: Models & Applications*. San Francisco:

John Wiley & Sons, Inc.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Sukardi, H. M. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sukardi, H. M. (2015). *Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.

Surna, I.N. dan Pabdeirot, O.D. (2014). *Psikologi Pendidikan 1*. Jakarta: Erlangga.

Suryati, A.E., dan Haryanto, S. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif Di Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo Yogyakarta. *Wiyata Dharma Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 4(2).

Widyawati, R. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Inklusi Sekolah Dasar. *Jurnal Kelola*, 4(1).

Yuwono, I. (2017). CIPPO Evaluation at School Providing Inclusive Education at Elementary School, 1(2), 126–130.